



2022

RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(BPKAD) KABUPATEN BLITAR**

Jalan Soedanco Supriyadi Nomor 17 Blitar

Telepon (0341) 815238

Email: blitarbpkad@gmail.com

Website: bpkad.blitarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa kepala perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Akhir Renja. Hal tersebut mempertimbangkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Renja dan Penyampaian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk diverifikasi.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar menyempurnakan Rancangan Akhir Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 menjadi Renja BPKAD Kabupaten Blitar 2022. Secara normatif, selain mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara mendetail dokumen ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara alur perencanaan, Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022, menyelaraskan pada RKPD Kabupaten Blitar tahun 2022. Dimana didalamnya terdapat tema, prioritas pembangunan, program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas tahun 2022, yang telah disepakati dalam konsultasi publik.

Secara garis besar, dokumen ini juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kab. Blitar Tahun 2021-2026. Dengan demikian telah terdapat kesesuaian antara dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Blitar dengan dokumen perencanaan BPKAD Kab. Blitar.

Dinamika perubahan lingkungan strategis pada saat ini telah bergerak dengan cepat dan pesat, karena pengaruh perkembangan teknologi informasi yang semakin masif. Hal tersebut membuat daerah berkembang dengan cepat dan dinamis. Dengan adanya perkembangan arus informasi yang cepat, maka masyarakat dapat mengakses informasi yang relatif mudah dalam rangka mengembangkan kehidupan sosial ekonominya. Perkembangan tersebut menjadi tanda bahwa kita sedang memasuki era disrupsi, sebuah era dimana terjadinya “kekacauan” baru akibat perubahan, keadaan yang semula nyaman, mapan dan menyenangkan secara tiba-tiba berubah tidak menentu. Di dalam era tersebut, desa dapat semakin maju melalui penciptaan peluang-peluang baru, masyarakat desa semakin kritis, dan semakin mampu menganalisis setiap informasi di media massa dan media sosial. Maka perlu adanya strategi pengelolaan keuangan dan aset daerah, dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Blitar. Dengan demikian, BPKAD Kab. Blitar melaksanakan penyusunan dokumen Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 sebagai upaya menjawab tantangan tersebut.

Dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta senada dengan Visi Misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026, maka BPKAD Kab. Blitar yang mengemban misi ke-3 yaitu: **“Pengoptimalan Kinerja**

Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas” dan mengimplementasikan ke dalam dokumen Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022, dengan tema: “Pemantapan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat Berbasis Pemberdayaan”. Dengan demikian seluruh program kegiatan di lingkungan BPKAD Kab. Blitar Tahun 2023, mengacu pada visi misi dan tema tersebut, dengan Prioritas Pembangunan: pelayanan publik berbasis *e-government*.

Akhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala daya dan upaya dari seluruh jajaran BPKAD Kab. Blitar, kami berharap ide-ide kreatif dan inovatif yang terdapat dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan yang masuk ke dalam Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan di Kabupaten Blitar.

Blitar, 24 Desember 2021
Plt. Kepala BPKAD Kab. Blitar

KURDIYANTO, SE., MM.
Pembina
NIP. 19770422 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN LALU	14
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD	35
2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) .	41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	49
3.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	68
BAB V PENUTUP	73

HURUB HAMBANGUN PRAJA
Semangat Membangun Negeri



**Meningkatkan Kinerja Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah**



BAB I PENDAHULUAN

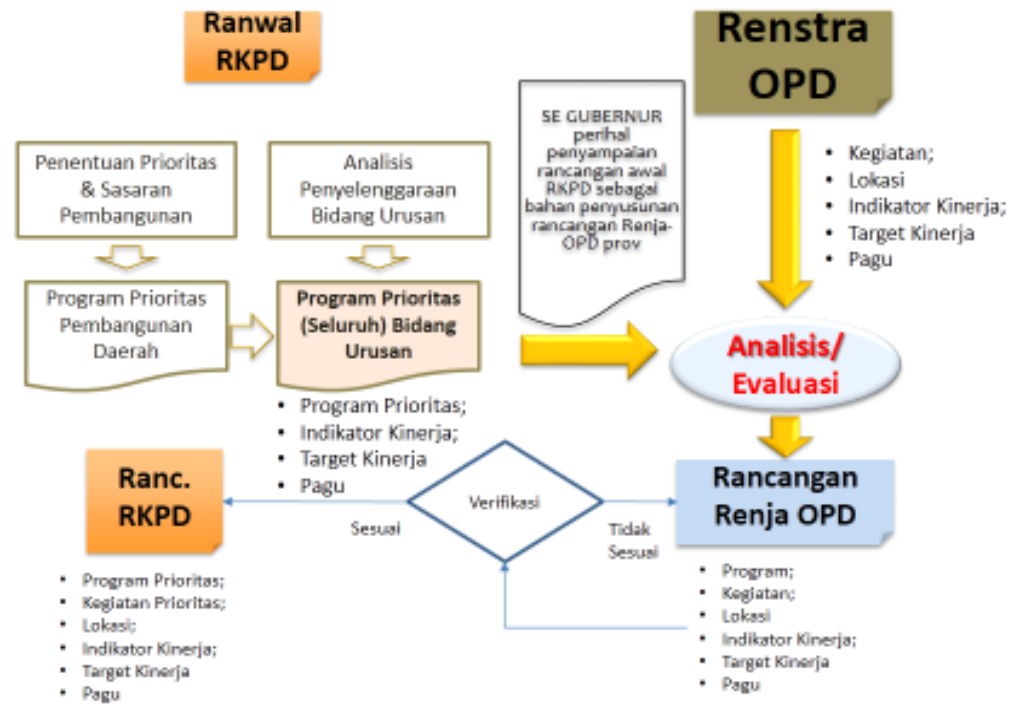
1.1 Latar Belakang

*P*erencanaan menempati peranan yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

*H*al tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/ kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

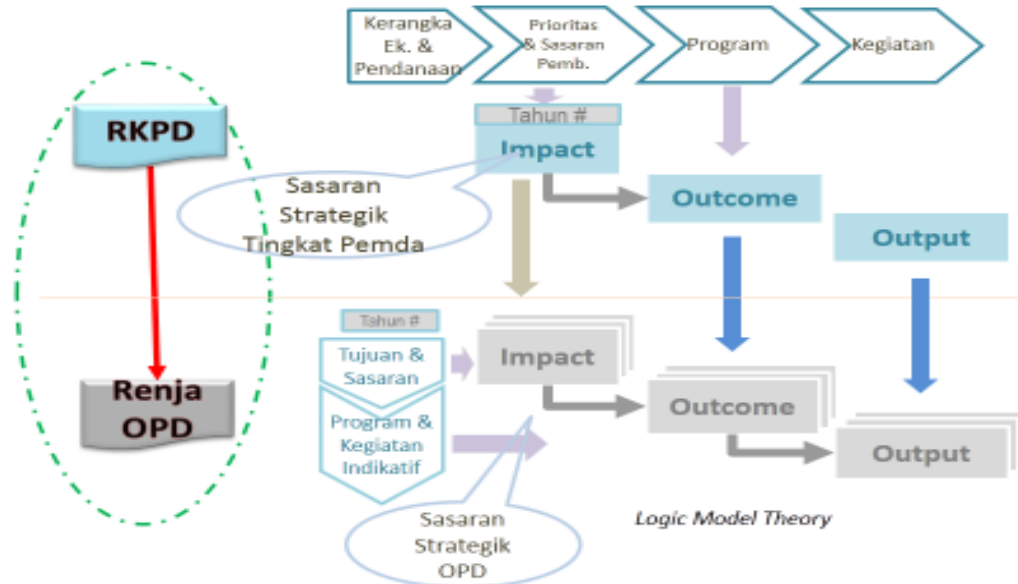
(RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di tingkat pusat maupun provinsi.

BAGAN ALUR 1: PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-OPD

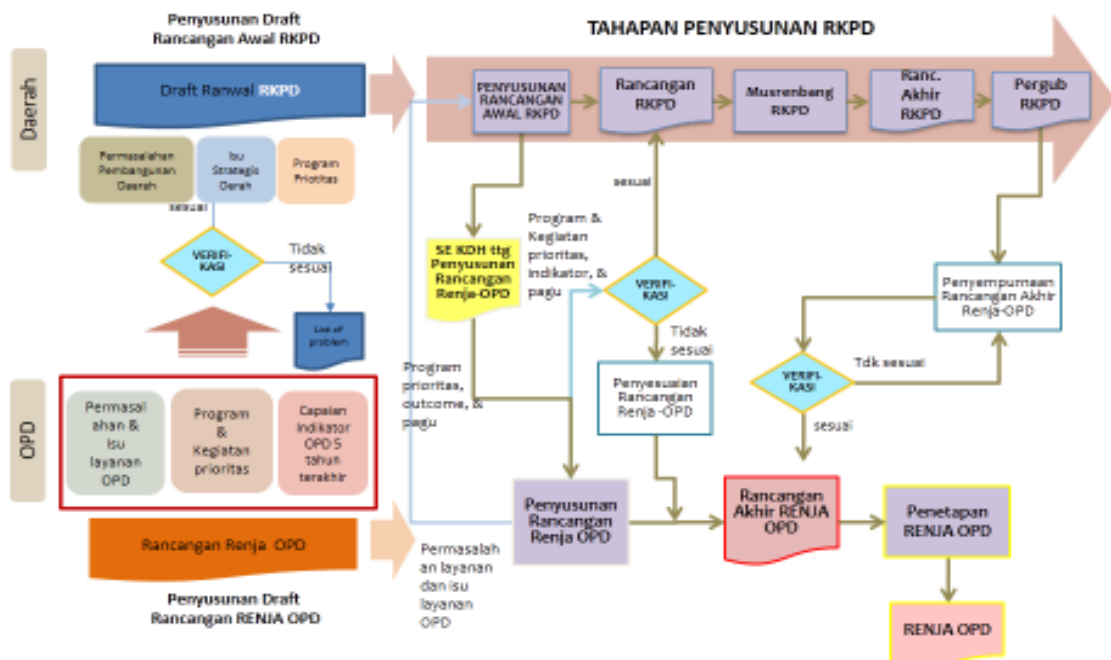


Dalam pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan *stakeholders* atau para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karena itu, Perangkat Daerah (PD) sebagai *stakeholders* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan menyelaraskan pada dokumen perencanaan makro di daerah.

BAGAN ALUR 2: Keterkaitan RKPD dan Renja OPD

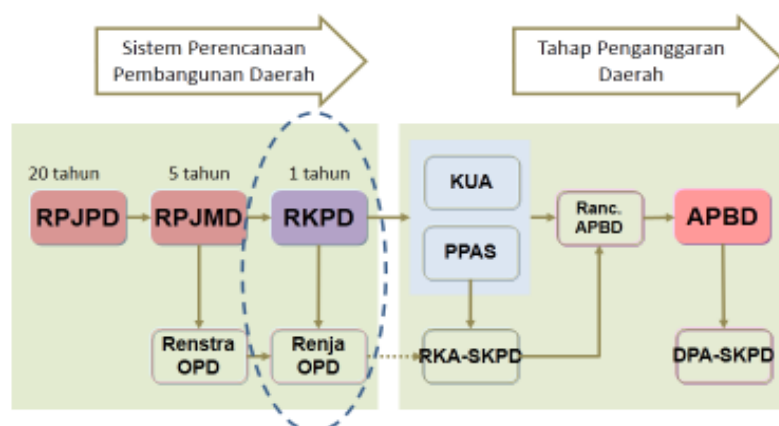


BAGAN ALUR 3: KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD & RENJA OPD



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan oleh PD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan PD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perihal yang mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja PD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka BPKAD Kabupaten Blitar melakukan penyusunan Renja Tahun 2022.

**BAGAN ALUR 4:
HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN & DOKUMEN
PENGANGGARAN**



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Blitar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar. BPKAD Kab. Blitar merupakan unsur pendukung urusan keuangan yang menunjang proses pembangunan.

Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kab. Blitar Tahun 2021-2026, yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar yaitu misi ke-3: **“Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas”**.

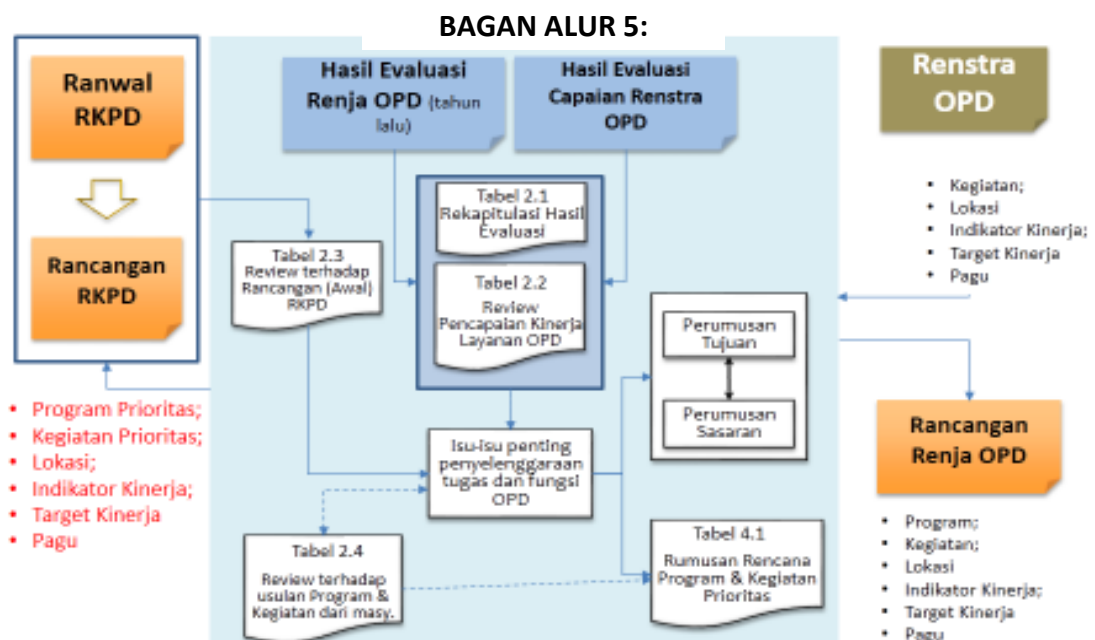
Renja BPKAD Kab. Blitar adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun dari partisipasi masyarakat. Sehingga Renja ini menjadi pedoman dan rujukan awal dalam menyusun program dan kegiatan pada BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022. Dengan mengarah pada agenda prioritas pembangunan di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Blitar Tahun 2022, dengan Tema: **Pemantapan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan**.

Dari hasil evaluasi Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2021 dan proyeksi capaian Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022, maka program/kegiatan difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

dan aset daerah secara efektif dan akuntabel . Selanjutnya BPKAD Kab. Blitar merencanakan secara detail agenda tersebut di dalam Renja PD ini.

Secara terstruktur, proses penyusunan Renja BPKAD Kab. Blitar dapat didiskripsikan dalam bagan alur sebagai berikut:

BAGAN ALUR 5: PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-OPD



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025, khususnya pada Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Susunan Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kab. Blitar;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Ranwal Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2023 dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan awal dalam menyusun dokumen perencanaan yang mendiskripsikan program/ kegiatan/ sub kegiatan pada BPKAD Kab. Blitar Tahun 2023;
- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam Ranwal RKPD Kab. Blitar Tahun 2023 dengan mengutamakan pengaruh pada isu-isu strategis tahun 2023.

Tujuan penyusunan Ranwal Renja pada BPKAD Kab. Blitar Tahun 2023 adalah:

- a. Renja menjadi pedoman awal bagi BPKAD Kab. Blitar dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya sesuai dengan RKPD Kab. Blitar Tahun 2022;
- b. Renja merupakan dokumen yang berisikan program, kegiatan, dan sub kegiatan BPKAD Kab. Blitar Tahun 2023, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kab. Blitar Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan Ranwal RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BPKAD Kab. Blitar tahun 2022 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Ranwal Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Ranwal Renja PD, peroses penyusunan Ranwal Renja PD, keterkaitan antara Ranwal Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L, dan Renja Provinsi/ Kab/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Ranwal Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Ranwal Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Ranwal Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (reviue) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Renstra PD pada tahun-tahun sebelumnya, yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD. Pokok-pokok yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melampaui target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tupoksi masing-masing PD dan peraturan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan tentang:

1. Sejauh mana tingkat pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi. Sub bab ini mendiskripsikan:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Ranwal Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian mengenai garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; dan
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program dan kegiatan, pagu indikatif, maupun keduanya.

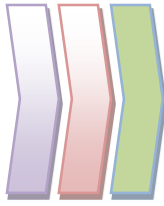
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung administrasi, faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan rumusan program dan kegiatan yang tidak terdapat/ sesuai dalam Ranwal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana Tindak Lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kab. Blitar Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja BPKAD Kab. Blitar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kab. Blitar pada tahun 2021, sebagai dasar penetapan target pada tahun 2022.

Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021, program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada RPJMD Kab. Blitar Tahun 2021-2026, dimana alokasi anggaran BPKAD Kab. Blitar pada Tahun 2021 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dalam DPPA BPKAD Kab. Blitar, sebesar Rp. 382.550.944.511,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 362.957.865.804,00 (94,88%). Pengelolaan anggaran yang berprinsip pada efektivitas, efisiensi, kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Alokasi anggaran dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan 1 (satu) program rutin, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar dan 2 (dua) program teknis, yaitu: Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Urusan Penunjang di Bidang Keuangan dilaksanakan melalui 3 program, 12 kegiatan, dan 46 sub kegiatan, yang secara spesifik didiskripsikan sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR	39.257.777.224	38.351.424.344	97,69
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.859.500	10.800.450	99,46
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.859.500	10.800.450	99,46
2	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	35.973.044.399	35.163.085.265	97,75
2.1	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.519.157.399	34.739.555.265	97,81
2.2	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	446.940.000	417.680.000	93,45
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.947.000	5.850.000	84,21
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.300.000	32.899.000	51,16
3.1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	64.300.000	32.899.000	51,16
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	459.050.201	456.708.600	99,49
4.1	Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	42.647.700	42.503.000	99,66
4.2	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.212.401	119.189.000	99,98
4.3	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.775.000	60.705.500	96,70
4.4	Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	171.891.100	171.890.650	100,00
4.5	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.524.000	62.420.450	99,83
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	633.826.000	630.428.192	99,46
5.1	Subkeg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	346.602.192	99,03
5.2	Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	281.759.000	281.759.000	100,00
5.3	Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.067.000	2.067.000	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	843.932.124	811.034.397	96,10
6.1	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	365.932.124	346.090.517	94,58
6.2	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	478.000.000	464.943.880	97,27
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.272.765.000	1.246.468.440	97,93
7.1	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	65.175.000	46.159.250	70,82
7.2	Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.690.000	131.226.000	99,65
7.3	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.075.900.000	1.069.083.190	99,37
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	342.333.771.187	323.674.918.170	94,55
1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.051.582.950	1.968.926.006	95,97
1.1	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	16.300.000	16.222.500	99,52

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.2	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	49.107.000	36.956.500	75,26
1.3	Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.090.883.300	1.067.030.400	97,81
1.4	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	540.596.800	507.647.750	93,91
1.5	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	354.695.850	341.068.856	96,16
2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	318.730.000	317.232.645	99,53
2.1	Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	102.463.000	101.889.800	99,44
2.2	Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	21.193.900	21.160.900	99,84
2.3	Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25.139.000	24.568.445	97,73
2.4	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	102.722.000	102.454.900	99,74
2.5	Sub. Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2.880.000	2.843.600	98,74
2.6	Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	46.109.000	46.099.000	99,98
2.7	Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	18.223.100	18.216.000	99,96
3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	371.779.500	300.105.104	80,72
3.1	Sub.Keg.Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	9.647.000	7.797.816	80,83
3.2	Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	15.699.000	9.984.750	63,60
3.3	Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	23.571.000	22.536.083	95,61
3.4	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	113.772.500	85.767.348	75,38
3.5	Sub.Keg. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.337.500	-	-
3.6	Sub.Keg. Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	102.971.000	82.131.500	79,76
3.7	Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5.974.000	5.293.607	88,61
3.8	Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi,Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	98.807.500	86.594.000	87,64

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	339.591.678.737	321.088.654.415	94,55
4.1	Sub.keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	311.143.999.400	311.054.462.550	99,97
4.2	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.000.000.000	751.296.370	5,01
4.3	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	13.447.679.337	9.282.895.495	69,03
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	959.396.100	931.523.290	97,09
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	959.396.100	931.523.290	97,09
1.1	Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	195.710.300	195.644.800	99,97
1.2	Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah	34.230.000	34.095.000	99,61
1.3	Sub.Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah	577.786.800	575.160.990	99,55
1.4	Sub.Keg. Penilaian Barang Milik Daerah	23.520.000	23.508.500	99,95
1.5	Sub.Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	128.149.000	103.114.000	80,46
	Total	382.550.944.511	362.957.865.804	94,88

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2021.

Selanjutnya Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d. Tahun 2021 Kabupaten Blitar

Nama PD: BPKAD Kab. Blitar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR	<i>Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan</i>	100%	100%
	Sub.Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja PD yang Disusun</i>	2 Dokumen	2 Dokumen
	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel</i>	100%	100%
	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji & Tunjangan</i>	55 Orang	55 Orang
	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun</i>	1 Laporan	1 Laporan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	55 Orang
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12 Bulan	12 Bulan
	Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	15 Jenis	15 Jenis
	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis
	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis
	Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang Disediakan	15 Jenis	15 Jenis
	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Kali	15 Kali
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat Sasaran	100%	100%
	Subkeg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ Operasional yang Diadakan	3 unit	4 Unit
	Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	8 unit	8 unit
	Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1 Unit	1 Unit
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	100%	100%
	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	12 Bulan	12 Bulan
	Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit
	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah jabatan yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala	2 Unit	2 Unit
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD	100%	100%
		Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	90%	90%
		Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	80%	80%
		Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020
		<i>Waktu dan sesuai dengan SAP</i>		
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	100%
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi Perubahan RKA SKPD	30%	30%
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi Perubahan DPA SKPD	20%	20%
	Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Dan Perbup Yang Disusun Tepat Waktu	1 Perda dan 1 Perbup	1 Perda dan 1 Perbup
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perubahan Peraturan Daerah Dan Perbup Yang Disusun Tepat Waktu	1 Perda dan 1 Perbup	1 Perda dan 1 Perbup
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen tentang Teknis Kebijakan Anggaran yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah sesuai Rencana	95%	95%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Kas Daerah	12.000 Dokumen	12.000 Dokumen
		Jumlah Perbup dan SK Bupati yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dengan Bank Penempuh RKUD dalam 1 Tahun	48 Dokumen	48 Dokumen
	Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD dan SP2D yang diterbitkan dalam 1 Tahun	200 SPD dan 12.000 SP2D	200 SPD dan 12.000 SP2D
	Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Penyerapan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	95%	95%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan
	Sub. Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen (Berita Acara) Hasil Rekonsiliasi	120 Dok/ BA	120 Dok/ BA
	Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Disusun	1 Perbup	1 Perbup
	Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang yang Dilaksanakan	2 Kali	2 Kali

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan	100%	100%
	Sub.Keg.Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan yang disusun dalam satu tahun	12 Lap	12 Lap
	Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah SKPD yang mengikuti Rekonsiliasi dan yang telah di Evaluasi	52 SKPD	52 SKPD
	Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun dalam satu tahun	12 Lap	12 Lap
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Keuangan Pemkab Blitar yang tersusun Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan	7 Lap	7 Lap
	Sub.Keg. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Tepat Waktu	1 Perda 1 Perbup	1 Perda 1 Perbup
	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti LHP BPK	100%	100%
	Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Sidang TGR yang Terlaksana Dalam 1 Tahun	4 Kali	10 Kali
	Sub. Keg. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Perundang-undangan terkait Akuntansi yang Diterbitkan	1 Dok	1 Dok
	Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi,Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Sosialisasi Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	1 Kali	1 Kali
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, dan Dana Darurat	100%	100%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Persentase Dana Bagi Hasil yang Disalurkan	100%	100%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang Tersedia	2%	2%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Persentase Dana Bagi Hasil yang Disalurkan	95%	95%
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar	90%	90%
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan	90%	100%
	Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun	3 Dok	3 Dok
	Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah UPB yang Melaksanakan Penatausahaan & Inventarisasi BMD secara Tertib sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	100 UPB	100 UPB
	Sub.Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Tanah yang Disertifikat dalam 1	50 Sertif.	100 Sertif.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020
		<i>Tahun</i>		
		<i>Jumlah BMD yang Diamankan dalam 1 Tahun</i>	44 Papan Nama	44 Papan Nama
	Sub.Keg. Penilaian Barang Milik Daerah	<i>Persentase BMD yang Bernilai Wajar</i>	85%	85%
	Sub.Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Penghapusan BMD berdasarkan Pengajuan</i>	500 Unit	500 Unit
		<i>Jumlah Dokumen Penghapusan BMD dalam 1 Tahun</i>	1 Dok	1 Dok
		<i>Jumlah Aset yang Dimanfaatkan dalam 1 Tahun</i>	119 Unit	119 Unit

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021
------	--	---	---

	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR	<i>Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	74	76.77	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan</i>	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja PD yang Disusun</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel</i>	100%	100%	100%
	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji & Tunjangan</i>	55 Orang	55 Orang	100%
	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun</i>	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%		
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	55 Orang	20 Orang	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel</i>	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan</i>	15 Jenis	15 Jenis	100%
	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	3 Jenis	3 Jenis	100%
	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Jenis	3 Jenis	100%
	Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang Disediakan</i>	15 Jenis	15 Jenis	100%
	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 Kali	15 Kali	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Tepat Sasaran</i>	100%	100%	100%
	Subkeg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah kendaraan dinas/ Operasional yang Diadakan</i>	3 unit	4 Unit	100%
	Subkeg. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan</i>	8 unit	8 unit	100%
	Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan</i>	1 Unit	1 Unit	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021		
			Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pemerintahan Daerah	yang Disediakan Tepat Waktu			
	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	100%
	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah jabatan yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala	2 Unit	2 Unit	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	90%	90%	100%
		Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	80%	80%	100%
		Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi Perubahan RKA SKPD	30%	30%	100%
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi Perubahan DPA SKPD	20%	20%	100%
	Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Dan Perbup Yang Disusun Tepat Waktu	1 Perda dan 1 Perbup	1 Perda dan 1 Perbup	100%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perubahan Peraturan Daerah Dan Perbup Yang Disusun Tepat Waktu	1 Perda dan 1 Perbup	1 Perda dan 1 Perbup	100%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen tentang Teknis Kebijakan Anggaran yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Kegiatan Koordinasi dan	Persentase Tingkat Penyerapan	95%	95%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021		
			Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Anggaran Perangkat Daerah sesuai Rencana			
	Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Kas Daerah	12.000 Dokumen	12.000 Dokumen	100%
		Jumlah Perbup dan SK Bupati yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dengan Bank Penempuh RKUD dalam 1Tahun	48 Dokumen	48 Dokumen	100%
	Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD dan SP2D yang diterbitkan dalam 1 Tahun	200 SPD dan 12.000 SP2D	200 SPD dan 12.000 SP2D	100%
	Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Penyerapan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	95%	95%	100%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Sub. Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen (Berita Acara) Hasil Rekonsiliasi	120 Dok/ BA	120 Dok/ BA	100%
	Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Disusun	1 Perbup	1 Perbup	100%
	Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	100%
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan	100%	100%	100%
	Sub.Keg.Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan yang disusun dalam satu tahun	12 Lap	12 Lap	100%
	Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah SKPD yang mengikuti Rekonsiliasi dan yang telah di Evaluasi	52 SKPD	52 SKPD	100%
	Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun dalam satu tahun	12 Lap	12 Lap	100%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang	Jumlah Laporan Keuangan Pemkab Blitar yang tersusun	7 Lap	7 Lap	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021		
			Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan			
	Sub.Keg. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda dan Perbup Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Tepat Waktu	1 Perda 1 Perbup	1 Perda 1 Perbup	100%
	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti LHP BPK	100%	100%	100%
	Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Sidang TGR yang Terlaksana Dalam 1 Tahun	4 Kali	4 Kali	100%
	Sub. Keg. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Perundang-undangan terkait Akuntansi yang Diterbitkan	1 Dok	1 Dok	100%
	Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Sosialisasi Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	1 Kali	1 Kali	100%
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, dan Dana Darurat	100%	100%	100%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Persentase Dana Bagi Hasil yang Disalurkan	100%	100%	100%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang Tersedia	2%	2%	100%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Persentase Dana Bagi Hasil yang Disalurkan	95%	95%	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar	90%	90%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan	90%	100%	
	Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun	3 Dok	3 Dok	100%
	Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah UPB yang Melaksanakan Penatausahaan & Inventarisasi BMD secara Tertib sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	100 UPB	100 UPB	100%
	Sub.Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Tanah yang Disertifikat dalam 1 Tahun	50 Sertif.	100 Sertif.	
		Jumlah BMD yang Diamankan dalam 1 Tahun	44 Papan Nama	44 Papan Nama	100%
	Sub.Keg. Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Bernilai Wajar	85%	85%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)/ Sub Kegiatan (<i>Specific Output</i>)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021		
			Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
	Sub.Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah Penghapusan BMD berdasarkan Pengajuan</i>	500 Unit	500 Unit	100%
		<i>Jumlah Dokumen Penghapusan BMD dalam 1 Tahun</i>	1 Dok	1 Dok	100%
		<i>Jumlah Aset yang Dimanfaatkan dalam 1 Tahun</i>	119 Unit	119 Unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>)/ Sub Kegiatan (<i>Specific Output</i>)	Target Program/ Kegiatan/	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan
------	---	---	---------------------------	---

			Sub Kegiatan PD Tahun 2022	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR	<i>Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	74	76.77	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan</i>	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja PD yang Disusun</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel</i>	100%	100%	100%
	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji & Tunjangan</i>	55 Orang	20 Orang	
	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Lap Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keu SKPD</i>	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun</i>	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	55 Orang	20 Orang	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel</i>	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan</i>	15 Jenis	15 Jenis	100%
	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	3 Jenis	3 Jenis	100%
	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Jenis	3 Jenis	100%
	Subkeg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan</i>	15 Jenis	15 Jenis	100%
	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	100 Kali	15 Kali	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat Sasaran</i>	100%	100%	100%
	Subkeg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah kendaraan dinas/ Operasional yang Diadakan</i>	3 unit	4 Unit	100%
	Subkeg. Pengadaan Peralatan dan	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin</i>	8 unit	8 unit	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan	
				Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
	Mesin Lainnya	Lainnya yang Diadakan			
	Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1 Unit	1 Unit	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	100%
	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah jabatan yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala	2 Unit	2 Unit	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD	100%	100%	100%
		Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	90%	90%	100%
		Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	80%	80%	100%
		Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi Perubahan RKA SKPD	30%	30%	100%
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi Perubahan DPA SKPD	20%	20%	100%
	Sub.Keg.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah Dan Perbup Yang Disusun Tepat Waktu	1 Perda dan 1	1 Perda dan 1 Perbup	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan	
				Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
	tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Perbup		
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perubahan Peraturan Daerah Dan Perbup Yang Disusun Tepat Waktu	1 Perda dan 1 Perbup	1 Perda dan 1 Perbup	100%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen tentang Teknis Kebijakan Anggaran yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah sesuai Rencana	95%	95%	100%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Kas Daerah	12.000 Dokumen	12.000 Dokumen	100%
		Jumlah Perbup dan SK Bupati yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dengan Bank Penempuh RKUD dalam 1Tahun	48 Dokumen	48 Dokumen	100%
	Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD dan SP2D yang diterbitkan dalam 1 Tahun	200 SPD dan 12.000 SP2D	200 SPD dan 12.000 SP2D	100%
	Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Penyerapan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	95%	95%	100%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Sub. Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen (Berita Acara) Hasil Rekonsiliasi	120 Dok/ BA	120 Dok/ BA	100%
	Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Disusun	1 Perbup	1 Perbup	100%
	Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang	2 Kali	2 Kali	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan	
				Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
	Pemerintah Kabupaten / Kota	Dilaksanakan			
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan	100%	100%	100%
	Sub.Keg.Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan yang disusun dalam satu tahun	12 Lap	12 Lap	100%
	Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah SKPD yang mengikuti Rekonsiliasi dan yang telah di Evaluasi	52 SKPD	52 SKPD	100%
	Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD dan LK Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun dalam satu tahun	12 Lap	12 Lap	100%
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Keuangan Pemkab Blitar yang tersusun Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan	7 Lap	7 Lap	100%
	Sub.Keg. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda dan Perbup Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Tepat Waktu	1 Perda 1 Perbup	1 Perda 1 Perbup	100%
	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti LHP BPK	100%	100%	100%
	Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	Jumlah Sidang TGR yang Terlaksana Dalam 1 Tahun	4 Kali	10 Kali	100%
	Sub. Keg. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Perundang-undangan terkait Akuntansi yang Diterbitkan	1 Dok	1 Dok	100%
	Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi,Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Sosialisasi Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana	1 Kali	1 Kali	100%
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, dan Dana Darurat	100%	100%	100%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Persentase Dana Bagi Hasil yang Disalurkan	100%	100%	100%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang Tersedia	2%	2%	100%
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi	Persentase Dana Bagi Hasil yang	95%	95%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Specific Output)	Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d. Tahun Berjalan	
				Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (2022)	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
	Hasil Kabupaten/ Kota	Disalurkan			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar	90%	90%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan	90%	100%	
	Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun	3 Dok	3 Dok	100%
	Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah UPB yang Melaksanakan Penatausahaan & Inventarisasi BMD secara Tertib sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	100 UPB	100 UPB	100%
	Sub.Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Tanah yang Disertifikat dalam 1 Tahun	50 Sertif.	100 Sertif.	
		Jumlah BMD yang Diamankan dalam 1 Tahun	44 Papan Nama	44 Papan Nama	100%
	Sub.Keg. Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Bernilai Wajar	85%	85%	100%
	Sub.Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Penghapusan BMD berdasarkan Pengajuan	500 Unit	500 Unit	100%
		Jumlah Dokumen Penghapusan BMD dalam 1 Tahun	1 Dok	1 Dok	100%
		Jumlah Aset yang Dimanfaatkan dalam 1 Tahun	119 Unit	119 Unit	100%

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2021.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan meliputi aspek: (a) perencanaan keuangan dan (b) manajemen keuangan. Adapun realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penunjang bidang keuangan sebagai berikut:

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan dan Keuangan:

1. Rasio Belanja Pegawai (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan) dari Target sebesar 10 %, telah tercapai sebesar 5,42 % Capaian tersebut mendiskripsikan bahwa dengan alokasi belanja Pegawai (di luar guru dan tenaga kesehatan) yang tidak lebih dari 20%, maka ruang/kapasitas fiskal daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah lebih besar;
2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*), merupakan instrumen untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dan potensi pajak daerah. Dengan capaian 1,36% maka Pemerintah Kabupaten Blitar di tahun mendatang dapat lebih mengoptimalkan peningkatan PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Opini Laporan Keuangan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, Pemerintah Kabupaten Blitar mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah;

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Manajemen Keuangan:

1. *Budget Execution*: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD dengan target 90% tercapai 92,42%. Hal tersebut dapat didiskripsikan bahwa penyerapan anggaran berjalan optimal.
2. *Revenue Mobilization*: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD, mendiskripsikan bahwa realisasi PAD berjalan optimal karena telah melampaui target sebesar 100%.
3. *Assets Management*: bahwa telah disusun daftar aset tetap, proses inventarisasi aset tahunan, dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMD Kab. Blitar.
4. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *Transfer Expenditures*), merupakan instrument untuk mengukur efisiensi belanja operasi di luar *transfer expenditures*, mencapai 66,43%.
5. *Cash Management*: merupakan Rasio SiLPA terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya, mencapai 13,44%.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Kab. Blitar

Kabupaten Blitar

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Keuangan											
1.	Rasio Belanja Pegawai (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)	-	-	10%	10%	10%	10%	5,42 %	6%	6%	6%	
2.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>Transfer Expenditures</i>)	-	-	1%	2%	3%	4%	1,36 %	2%	3%	4%	
3.	Opini Laporan Keuangan	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Keuangan											
1.	Budget Execution: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-	-	90%	90%	90%	90%	92,42 %				
2.	Revenue Mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	-	-	90%	90%	90%	90%	128,46 %	130%	140%	150%	
3.	Assets Management: 1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah Nilai Aset tercantum dalam Laporan Anggaran? (Ya/Tidak)	-	-	Ya Tidak Ya Tidak	Ya Tidak Ya Tidak	Ya Ya Ya Ya	Ya Ya Ya Ya	Ya Tidak Ya Tidak	Ya Tidak Ya Tidak	Ya Ya Ya Ya	Ya Ya Ya Ya	
4.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>Transfer Expenditures</i>)	-	-	60%	60%	60%	60%	60%	60%	66,43 %	60%	
5.	Cash Management: Rasio SilPA terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	-	-	15%	15%	15%	15%	15%	15%	13,44 %	15%	

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2021.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BPKAD Kab. Blitar tetap mempertimbangkan isu-isu strategis sebagai bentuk responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BPKAD Provinsi Jawa Timur). Secara garis besar keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh sinergitas antarfungsi PD dan antarlembaga perbankan, dan lembaga nonperbankan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain semakin menurunnya kapasitas fiskal nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah. Di sisi lain kondisi ruang fiskal daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan dari kapasitas ruang fiskal yang ada, terdapat pertambahan alokasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan CPNS dan P3K yang bertambah 3.478 ASN pada tahun 2022.

Dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, maka diperlukan inovasi dalam perencanaan anggaran guna mendukung visi-misi kepala daerah, program-program nasional/ internasional (NSPK, SPM, an SDG's). BPKAD Kab. Blitar sebagai PD Unsur Penunjang di Bidang Keuangan, memegang peran penting dalam menyusun “rancang bangun” anggaran khususnya pada tahun 2023. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi *Keys of Development Goals* bagi BPKAD Kabupaten Blitar dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Secara konkret, *Keys of Development Goals* di lingkup BPKAD Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui:

1. Rapat koordinasi Lintas PD dalam rangka melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan APBD sesuai dengan agenda prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022.

2. Desk Rembug Kinerja dalam rangka untuk menyusun Indikator Kinerja Individu, Perjanjian Kinerja, dan Penilaian Kinerja, sesuai dengan Renstra BPKAD Kab. Blitar tahun 2021-2026, dan RKPD Tahun 2022.
3. Evaluasi Internal dalam rangka membangun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup BPKAD Kabupaten Blitar, dan dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yaitu Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis BPKAD Kab. Blitar, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen BPKAD Kab. Blitar, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- (1) BPKAD Kab. Blitar memiliki peran strategis yang memiliki fungsi koordinatif dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ;

- (2) BPKAD Kab. Blitar telah memiliki sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kelembagaan, terutama pada aspek kinerja dan pengelolaan keuangan;
- (3) Pemanfaatan SPBE yang mendukung kinerja dan pelayanan BPKAD Kab. Blitar sebagai pusat data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pemanfaatan sistem informasi (aplikasi) keuangan/ aset daerah;
- (4) BPKAD Kab. Blitar memiliki Sumber Daya Aparatur yang memiliki semangat kerja, teamwork yang solid, dengan tingkat spesifikasi dan kualifikasi pegawai yang mengisi formasi jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana, yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- (5) BPKAD Kab. Blitar memiliki kegiatan diklat, seminar, bimtek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan/ lembaga swasta, perguruan tinggi/ akademisi, dan konsultan/ praktisi.
- (6) Komitmen pimpinan PD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel sebagai unsur pendukung dalam pencapaian keberhasilan program-program prioritas pembangunan daerah;
- (7) Penguatan Struktur dan Tata Kerja Organisasi (STOK) pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Susunan Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kab. Blitar, telah membawa perubahan pada ruang lingkup perencanaan penganggaran;

- (8) Penyederhanaan Birokrasi, dimana terdapat jabatan fungsional baru: Perencana, Analis Kebijakan, dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagai bentuk dukungan dan penguatan kinerja organisasi;

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- (1) Implementasi Jabatan Fungsional belum optimal;
- (2) Kompetensi pegawai (etos kerja, budaya kerja, pengetahuan) yang belum merata dan perlu di-*upgrading*;
- (3) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (Staf/ Pelaksana/JFU);
- (4) Lemahnya rentang kendali pelaporan dan penyajian data yang kurang tepat waktu;
- (5) Pengelolaan data dan arsip yang belum tertata sesuai ketentuan;
- (6) Lemahnya aspek pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan capaian kinerja (*output, outcome, benefit, impact*) dan belum optimalnya evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi. Hal tersebut tidak dapat dikelola secara langsung oleh Manajemen BPKAD Kab. Blitar. Namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Kebijakan (*political will*) Kepala Daerah dalam pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, yang diwujudkan dengan meningkatnya kinerja pengelolaan

keuangan dan aset daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Panca Bhakti;

- 2) Perubahan paradigma penganggaran yang lebih menitikberatkan pada kemampuan fiskal daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Koordinasi dan komunikasi antara BPKAD Kab. Blitar dengan DPRD, Perangkat Daerah dan Lembaga Keuangan, Lembaga Non Keuangan, maupun pemprov/ pusat yang telah berjalan efektif dalam merespons setiap perubahan kebijakan dan penyelesaian masalah dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) BPKAD Kab. Blitar memiliki kerja sama dengan mitra kerja (DPRD/ Perguruan Tinggi/ Akademisi, Lembaga Keuangan Perbankan) yang sangat efektif dalam peningkatan kinerja dan penatausahaan keuangan dan aset daerah;
- 5) Pendampingan yang efektif lembaga konsultan dalam mendukung kinerja dan penyelesaian masalah keuangan dan aset daerah;
- 6) Potensi Aset Daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma dokumen perencanaan periode tahun 2021-2026, yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, yang berimplikasi pada kekuatan dan kemamuan fiskal daerah dalam mengakomodasi agenda pembangunan daerah;
- (2) Berkurangnya Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dikarenakan kapasitas fiskal nasional menurun;

- (3) Belum optimalnya capaian Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (4) Alokasi belanja pegawai daerah yang relatif besar; dan
- (5) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, sehingga permasalahan aset belum terselesaikan.

Dari formulasi situasi dan kondisi (internal dan eksternal) maka BPKAD Kab. Blitar menindaklanjuti dalam kebijakan umum sebagai berikut :

No	Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR/ Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR/ Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Keuangan;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR/ Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Keg. Administrasi Keuangan PD
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah untuk mendukung peningkatan PAD;	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Keg. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
6	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan PAD; dan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Keg. Pengelolaan BMD
7	Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang Akuntabel.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2022, maka program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan pada dukungan capaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Blitar, secara terpadu, berkelanjutan, berkeadilan antar wilayah di Kabupaten Blitar.

Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana secara teknis dilaksanakan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah pada akhirnya diukur dengan instrumen Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung Tema Ranwal RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023: **“Pemantapan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan”**. Tema tersebut dilaksanakan dengan prioritas-prioritas:

- a. Pembangunan SDM, Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran;
- b. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar;
- c. Pelayanan publik berbasis *e-Government*; dan
- d. Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan pertanian.

Tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 juga disandingkan dengan Panca Bhakti Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, meliputi:

- Bhakti 1 : Jaminan Pendidikan Masyarakat dan Desa** (Blitar Cerdas dan Beradab, Jaminan Pendidikan, Beasiswa Perguruan Tinggi, Pustaka Pesantren, Reward Guru Ngaji dan Moden, Reward GTT/PTT, Pengembangan Sumber Daya Manusia)
- Bhakti 2 : Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, serta Perlindungan Ibu dan Anak** (Pengobatan Gratis, Pengendalian COVID-19, Health Circle Area, dan Optimalisasi Laboratorium)
- Bhakti 3 : Pelayanan Publik Berbasis *e-government*** (e-adminduk, *e-health*, *e-transparency*, *Public Service Center*, Internet Sambung Desa)
- Bhakti 4 : Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah** (Pengembangan Potensi Peternakan, Optimalisasi Teknologi Pengairan, Revitalisasi Pasar, Optimalisasi Produk Unggulan berbasis Potensi Kawasan, dan pengembangan Ekonomi Hulu-Hilir.
- Bhakti 5 : Pesona Blitar Raya** (Perbaikan Infrastruktur Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Desa Mandiri, dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Maka BPKAD Kab. Blitar sebagai PD pendukung urusan keuangan, secara umum mendukung seluruh tema-tema tersebut melalui perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan KUA-PPAS, RAPBD sampai dengan Penetapan APBD regular dan perubahan. BPKAD Kab. Blitar memastikan bahwa seluruh tema tersebut telah masuk dalam proses penganggaran dan mengawal proses pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan pengelolaan keuangan daerah.

Secara khusus, BPKAD Kab. Blitar juga mendukung optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis *e-governemnt*, mengingat dalam menjalankan mekanisme perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset desa, sampai dengan pelaporan akuntansi, BPKAD Kab. Blitar menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah, yang terus diupgrade setiap

tahunnya. Hal tersebut untuk menjamin penyajian data keuangan dan aset secara tepat waktu dan *upto date*.

Tabel T-C.31
Reviu Terhadap RKPD Tahun 2022 Kabupaten Blitar

Nama OPD: BPKAD Kab. Blitar

No	Rancangan Awal (RKPD)					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat
	Prog./ Keg.	Lo k.	Indikator Kinerja	Target Cap.	Pagu Indikatif	Prog./ Keg.	L o k .	Indikator Kinerja	Targ et Cap.	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR		<i>Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	74	123.213.098.221	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR		<i>Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	123.213.098.221	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase Dokumen Perenc., Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan</i>	100%	8.531.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100 %	8.531.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel</i>	100%	118.605.530.619	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel</i>	100 %	118.605.530.619	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian		<i>Persentase ASN yang Mendapat</i>	100%	310.650.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian		<i>Persentase ASN yang Mendapat</i>	100 %	310.650.000	

	Perangkat Daerah		<i>Pelayanan Administrasi Kepegawai-an Perangkat Daerah</i>			Perangkat Daerah		<i>Pelayanan Administrasi Kepegawai-an Perangkat Daerah</i>		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12	1.148.742.801	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	12	1.148.742.801
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat Sasaran</i>	100%	946.913.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat Sasaran</i>	100 %	946.913.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah-an Daerah		<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah-an Daerah yang Disediakan Tepat Waktu</i>	100%	833.732.124	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah-an Daerah		<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah-an Daerah yang Disediakan Tepat Waktu</i>	100 %	833.732.124
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah-an Daerah		<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah-an Daerah dalam Kondisi Baik</i>	100%	1.358.998.677	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah-an Daerah		<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah-an Daerah dalam Kondisi Baik</i>	100 %	1.358.998.677
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		<i>Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD</i>	100%	385.849.254.212	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		<i>Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD</i>	100 %	385.849.254.212
			<i>Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja</i>	90%				<i>Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja</i>	90%	

			<i>Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan</i>	80%			<i>Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan</i>	80%		
			<i>Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP</i>	100%			<i>Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP</i>	100%		
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		<i>Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan</i>	100%	2.360.038.000	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan</i>	100%	2.360.038.000	
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		<i>Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah sesuai Rencana</i>	95%	592.898.000	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah sesuai Rencana</i>	95%	592.898.000	
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		<i>Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan</i>	100%	419.666.000	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan</i>	100%	419.666.000	
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		<i>Persentase Realisasi Dana Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, dan Dana Darurat</i>	100%	382.476.652.212	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase Realisasi Dana Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, dan Dana Darurat</i>	100%	382.476.652.212	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar</i>	90%	1.446.822.659	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar</i>	90%	1.446.822.659	

	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan	90%	1.446.822.659	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan	90%	1.446.822.659	
					510.509.175.092					510.509.175.092	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, telah dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang diusulkan melalui mekanisme perencanaan dalam Musrenbang mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, sampai dengan Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil proses musrenbang tersebut, maka pada tahun anggaran 2022 di BPKAD Kab. Blitar tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari usulan masyarakat.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Blitar

SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

NIHIL



BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Blitar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengacu pada agenda pembangunan global dalam *Millienium Development Goals* (MDG's) dan *Sustainable Development Goals* (SDG's), dan satu isu pembangunan regional adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)/ AEC (ASEAN Economic Community). Selain mengacu pada isu/ agenda pembangunan global dan regional, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Blitar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berpedoman pada Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar.

SDGs merupakan kelanjutan atau pengganti dari MDGs yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia, yang dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB pada 21 Oktober 2015 sebagai agenda pembangunan bersama hingga tahun 2030. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Blitar, maka tujuan SDGs yang terkait adalah:

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam

menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. Salah satu isu pembangunan regional adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)/ AEC (ASEAN Economic Community) yang akan memicu daya saing nasional, daerah, maupun desa.

Prioritas pembangunan nasional adalah terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas/ Nawacita yang diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah beserta desa. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*), Kesenjangan Antar Generasi (*intergenerational equity*) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Di Kabupaten Blitar, pemerintah daerah berupaya menjawab isu-isu global, regional, nasional, dan daerah melalui perumusan strategi pembangunan yang dijabarkan dalam visi misinya, yang secara garis besar berupaya menyejahterakan, memajukan (masyarakat) Kabupaten Blitar agar memiliki daya saing. Kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya merupakan syarat mendasar dalam mewujudkan daya saing sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Basis potensi-potensi daerah berada di lingkup desa maupun kawasan perdesaan.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar, maka di era pandemi COVID-19 ini, BPKAD Kab. Blitar merespon isu-isu dan kebijakan nasional, regional, dan daerah dengan semakin meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2022. Dengan memperhatikan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kab. Blitar Tahun 2022, yaitu **Pemantapan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Berbasis Pemberdayaan**, maka yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Pembangunan SDM, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
- Pemenuhan sarana dan prasarana pusat pemerintahan, kawasan perkotaan dan wilayah perbatasan;
- Pelayanan publik berbasis E-Government;
- Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar;
- Pengembangan kawasan strategis pariwisata dan pertanian;
- Penguatan kesiapsiagaan bencana dan pelestarian lingkungan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 mengacu pada Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kab. Blitar tahun 2021-2026, yang selanjutnya mengacu pada RKPD Kab. Blitar Tahun 2022.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi ke-3). BPKAD Kab. Blitar sebagai unsur penunjang di bidang Keuangan menerjemahkan sasaran strategis Kab. Blitar ke dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tujuan PD:

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran PD:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Indikator Sasaran: Nilai dan Predikat SAKIP
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
Indikator Sasaran:
 - a. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD;
 - c. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Indeks Penyerapan Anggaran dalam APBD;
 - e. Indeks Kondisi Keuangan Daerah; dan
 - f. Nilai Opini BPK atas LKPD .
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah

Selanjutnya sasaran PD didukung oleh Program, Kegiatan, Sub Kegiatan BPKAD Kab. Blitar pada tahun 2022.

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kab. Blitar pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Pada prinsipnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pada Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator yang terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan. Selanjutnya strategi dan kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan indikator yang lebih spesifik. Perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Ruang lingkup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah proses bisnis (*business process*) untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BPKAD Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota merupakan program rutin yang diampu oleh Sekretariat BPKAD Kabupaten Blitar, sebagai unsur perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota secara langsung mendukung Sasaran Perangkat Daerah, yaitu: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Sasaran: Nilai dan Predikat SAKIP. Secara spesifik, program penunjang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya program penunjang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD; dan
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya; dan
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta Bidang Akuntansi. Program tersebut mendukung Sasaran Perangkat Daerah yaitu: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Sasaran: (1) Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; (2) Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD; (3) Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran Dalam APBD; (5) Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah; dan (6) Opini BPK. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (diampu oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);

- e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
 - f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan; dan
 - g. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota;
 - e. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 - h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah kabupaten/ Kota.
4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan
 - c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota.

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Aset Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mendukung Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah, dengan Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah. Program tersebut secara spesifik mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dijabarkan dalam Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Standar Harga;
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3. Pengamanan Barang Milik Daerah;
4. Penilaian Barang Milik Daerah; dan
5. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Maka, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen Renja BPKAD Kab. Blitar pada Tahun 2022 sebanyak 3 Program, 12 Kegiatan, dan 48 Sub Kegiatan, yang tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan
Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Blitar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH- AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<i>Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	BPKA D	76	21.458.074.965	DAU/ APBD II	Tekno- ratik	77	58.843.950.106
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan</i>		100	14.880.250			100	25.000.000
	Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Renstra dan Renja PD yang Disusun</i>		2	14.880.250			2	25.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel</i>		100	16.472.325.056			100	56.466.950.106
	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji & Tunjangan</i>		55	16.027.701.556			55	56.375.450.106
	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>		12	441.150.000			12	91.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	289.450.000			100	210.000.000
	Subkeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		55	289.450.000			55	210.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel		12	576.409.663			12	933.000.000
	Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan		15	20.247.700			15	182.000.000
	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5	151.372.263			5	185.000.000
	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3	58.093.000			3	186.000.000
	Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		15	145.446.700			15	215.000.000
	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	201.250.000			100	165.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tepat Sasaran		100	2.295.305.750			100	473.000.000
	Subkeg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah kendaraan dinas/ Operasional yang Diadakan</i>		3	1.982.470.400			3	155.000.000
	Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan</i>		8	270.768.350			8	156.000.000
	Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan</i>		3	42.067.000			3	162.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu		100	964.514.840			100	324.000.000
	Subkeg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		12	3.000.000			12	46.000.000
	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik</i>		12	378.000.000			12	98.000.000
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>		12	583.514.840			12	180.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik		100	845.189.406			100	412.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan		12	35.844.400			12	105.000.000
	Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4	70.880.000			4	155.000.000
	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rumah jabatan yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala		2	738.465.006			2	152.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD</i>	BPKAD	100 %	415.331.152.661	DAU/ APBD II	Teknokratik	100%	395.560.963.908
		<i>Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja</i>		92%				93%	
		<i>Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan</i>		84%				86%	
		<i>Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP</i>		100 %				100%	
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan</i>		100 %	1.900.000.000			100%	1.707.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang tersusun		2	150.722.000			2	151.000.000
		Persentase Kesesuaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah terhadap RKPD		92%				93%	
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS yang tersusun		2	150.722.000			2	152.000.000
		Persentase Kesesuaian Target Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah terhadap RKPD Perubahan		92%				93%	
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi RKA SKPD		30%	151.770.000			30%	90.000.000
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan Rekomendasi atas Verifikasi DPA SKPD		20%	48.580.000			20%	50.000.000
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah dan Perbup yang disusun Tepat Waktu		2	958.026.000			2	864.000.000
		Jumlah Dok tentang teknis Kebij. Anggaran yang Tersusun		1				1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perubahan Peraturan Daerah dan Perbup yang disusun tepat waktu		2	376.392.000			2	335.000.000
		Jumlah Dokumen tentang teknis Kebijakan Anggaran yang Tersusun		1				1	
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen tentang Teknis Kebijakan Anggaran yang Disusun		2	63.788.000			2	65.000.000
		Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan		1				1	
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah sesuai Rencana		95%	318.730.000			95%	332.000.000
	Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Kas Daerah		15.000	102.463.000			15.000	90.000.000
		Jumlah Perbup dan SK Bupati yang disusun Tepat Waktu		2				2	
		Jumlah Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dengan Bank Penempuh RKUD dalam 1 Tahun		48				48	
	Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD dan SP2D yang diterbitkan dalam 1 Tahun		200 SPD/15.000 SP2D	25.590.000			200 SPD/15.000 SP2D	30.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Penyerapan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		95%	25.139.000			95%	30.000.000
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		12	102.722.000			12	103.000.000
	Sub. Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi		120	2.880.000			120	3.000.000
	Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan tentang Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Disusun		1	37.852.000			1	30.000.000
	Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Dilaksanakan		2	22.084.000			2	46.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan		100 %	571.779.500			100%	391.000.000
	Sub.Keg.Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	<i>Jumlah Laporan yang disusun dalam satu tahun</i>		12	29.145.000			12	30.000.000
	Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	<i>Jumlah SKPD yang mengikuti Rekonsiliasi dan yang telah di Evaluasi</i>		52	16.581.000			52	20.000.000
	Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan Pemkab Blitar yang tersusun Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan</i>		7	66.937.000			7	25.000.000
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Tepat Waktu</i>		1	153.254.100			1	110.000.000
	Sub.Keg. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<i>Persentase SKPD yang menindaklanjuti LHP BPK</i>		100%	1.337.500			100%	12.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Sub.Keg. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Jumlah Sidang TGR yang Terlaksana Dalam 1 Tahun</i>		4	96.931.900			4	97.000.000
	Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Peraturan Perundang-undangan terkait Akuntansi yang Diterbitkan</i>		1	89.840.000			1	8.000.000
	Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah Sosialisasi Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>		1	117.753.000			1	89.000.000
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase Realisasi Dana Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, dan Dana Darurat</i>		100 %	412.540.643.161			100%	393.130.963.908
	Sub.Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	<i>Persentase Dana Bantuan Keuangan yang Disalurkan</i>		95%	341.461.197.000			95%	320.130.963.908
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang Tersedia</i>		2%	53.044.320.000			2%	54.000.000.000
	Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Dana Bagi Hasil yang Disalurkan</i>		95%	18.035.126.161			95%	19.000.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar</i>	BPKAD	90%	1.428.393.100	DAU/APBD II	Teknokratik	90%	1.517.539.160
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan		90%	1.428.393.100			90%	1.517.539.160
	Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun		3	103.762.800			3	235.349.450
	Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah UPB yang Melaksanakan Penatausahaan & Inventarisasi BMD secara Tertib sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan		100	214.375.250			100	63.233.750
	Sub.Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Tanah yang Disertifikat dalam 1 Tahun		250	927.885.050			300	1.271.664.459
		Jumlah BMD yang Diamankan dalam 1 Tahun		50	125.000.000			44	110.000.000
	Sub.Keg. Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang Bernilai Wajar		87%	7.459.000			88%	32.291.501
	Sub.Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan, pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Penghapusan BMD berdasarkan Pengajuan		500	49.911.000			500	45.000.000
		Jumlah Dokumen Penghapusan BMD dalam 1 Tahun		1				1	30.000.000
		Jumlah Aset yang Dimanfaatkan dalam 1 Tahun		119				119	30.000.000
TOTAL					438.217.620.726				455.992.453.174

BPKAD Kab. Blitar, 2021



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan kerangka dasar dalam melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatan perangkat daerah. Maka Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2022 selanjutnya didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kab. Blitar TA 2022 khususnya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dengan model perencanaan teknokratis. Di mana pendanaan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dijabarkan dengan uraian sebagai berikut:

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (diampu oleh Sekretariat)

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Pagu: Rp. 14.880.250,00) dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Rp. 14.880.250,00)
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Pagu: Rp. 16.472.325.056,00) dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Rp. 16.027.701.556,00)
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Rp. 441.150.000,00)
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Rp. 3.473.500)
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Pagu: Rp. 289.000.000,00) dengan sub kegiatan:
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Rp. 289.450.000,00)
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Pagu: Rp. 576.409.663,00), dengan sub kegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Rp. 20.247.700,00)
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Rp. 151.372.263,00)
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Rp. 58.093.000,00)
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Rp. 145.446.700,00)
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Rp. 201.250.000,00)
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pagu: Rp. 2.295.305.750,00) dengan sub kegiatan:
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Rp. 1.982.470.400,00)
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Rp. 270.768.350,00)
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Rp. 42.067.000,00)
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pagu: Rp. 964.514.840,00) dengan sub kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Rp. 3.000.000,00)
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (Rp. 378.000.000,00)
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Rp. 583.514.840,00)
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Pagu: Rp. 845.189.406,00), dengan sub kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Rp. 35.844.400,00)
 - b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya (Rp. 70.880.000,00)
 - c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Rp. 738.465.006,00)

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Rp. 415.331.152.661,00)

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah (Pagu: Rp. 1.900.000.000,00) diampu oleh Bidang Anggaran, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS (Rp. 150.722.000,00)
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Rp. 150.722.000,00)
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD (Rp. 151.770.000,00)
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD (Rp. 48.580.000,00)
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Rp. 958.026.000,00)
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Rp. 376.392.000,00)
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Rp. 63.788.000,00)
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (Pagu: Rp. 318.730.000,00) diampu oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Rp. 102.463.000,00)
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Rp. 25.590.000,00)
 - c. Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Rp. 25.139.000,00)
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Rp. 102.722.000,00)
 - e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait (Rp. 2.880.000,00)

- h. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Rp. 37.852.000,00)
 - i. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Rp. 22.084.000,00)
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Pagu: Rp. 571.779.500,00) diampu oleh Bidang Akuntansi, dengan sub kegiatan:
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Rp. 29.145.000,00)
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban (Rp. 16.581.000,00)
 - c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Rp. 66.937.000,00)
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota (Rp. 153.254.100,00)
 - e. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Rp. 1.337.500,00)
 - f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Rp. 96.931.900,00)
 - g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Rp. 89.840.000,00)
 - h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah kabupaten/ Kota (Rp. 117.753.000,00)

4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Pagu : Rp. 412.540.643.161,00) diampu oleh Bidang Anggaran, dengan sub kegiatan:
 - a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Rp. 341.461.197.000,00)
 - b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Rp. 53.044.320.000,00)
 - c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota (Rp. 18.035.126.161,00)

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Rp. 1.428.393.100,00)

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pagu: Rp. 1.428.393.100,00) diampu oleh Bidang Pengelolaan Aset Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Standar Harga (Rp. 103.762.800,00)
 - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah (Rp. 214.375.250,00)
 - c. Pengamanan Barang Milik Daerah (Rp. 1.052.885.050,00)
 - d. Penilaian Barang Milik Daerah (Rp. 7.459.000,00)
 - e. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Rp. 49.911.000,00)

Total anggaran yang dikelola oleh BPKAD Kab. Blitar dalam Dokumen Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 sebesar Rp. 438.217.620.726,00. Anggaran tersebut dikelola/ diiput melalui mekanisme Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dengan dasar input pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Blitar menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat PD, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan daerah. Hal tersebut sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis ternokratis, politis, partisipatif, *top-down*, *bottom-up*. Dalam arti memprioritaskan Visi Misi Kepala Daerah yang setiap tahun memiliki tema dan prioritas pembangunan. Dengan harapan keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) semakin proaktif dalam rangka menciptakan *Good Governance* sesuai dengan paradigma pembangunan saat ini. Dimana pada akhirnya akan mampu menciptakan sebuah kebijakan yang efektif, yang memiliki dampak kepada masyarakat (*trickle down effect*). Dengan demikian keberpihakan kebijakan pemerintah daerah, yang tertuang dalam program dan kegiatan, dapat dirasakan oleh masyarakat.

Renja BPKAD Kabupaten Blitar, selain menjadi acuan pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022, berfungsi pula sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja BPKAD Kabupaten Blitar beserta seluruh jajarannya. Hal tersebut sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan/ manajemen dan seluruh elemen pada BPKAD Kabupaten Blitar, sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja di masa mendatang.

